



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SYAHRIAL
2. Jabatan : HAKIM TINGGI
3. NHK : 108754

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.785.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/75 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/45 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah Seluas 308 m2 di KAB / KOTA TASIKMALAYA, WARISAN Rp. 35.000.000
4. Tanah Seluas 420 m2 di KAB / KOTA TASIKMALAYA, WARISAN Rp. 50.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/75 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **476.500.000**

1. MOBIL, HONDA JAZZ SEDAN Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. MOTOR, HONDA BEBEK Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
3. MOTOR, HONDA BEBEK Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
4. MOTOR, HONDA HONDA MATIC Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
5. MOTOR, HONDA MATIC BEBEK Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000



6. MOBIL, TERIOS R DELUXE MT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	32.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	351.519.470
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.645.019.470
III. HUTANG	Rp.	27.228.400
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.617.791.070

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.